

BAB 1

PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan dari penelitian berupa latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari dilakukannya penelitian di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

1.1 Latar belakang

Dinas Perumahan & Permukiman Kota Balikpapan (DISPERKIM) merupakan organisasi perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman serta perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan permakaman (Effendi, 2016). Dalam menjalankan tugasnya DISPERKIM memiliki beberapa visi dan misi untuk memastikan tugas yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Beberapa misi DISPERKIM yaitu “Menyediakan prasarana dan sarana perumahan yang layak dan merata” yang bertujuan untuk memastikan tersedianya rumah tinggal yang memenuhi persyaratan untuk masyarakat kota Balikpapan, dan “Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang sehat dan berkualitas yang bertujuan untuk terwujudnya lingkungan permukiman yang nyaman”. Untuk menjalankan misi tersebut, DISPERKIM membuat sasaran yaitu “Mengurangi rumah persentase rumah tidak layak huni” dan “Mengurangi luas kawasan kumuh” (Balikpapan, 2016).

Pelaksanaan tugas dan misi yang berkaitan dengan permukiman seperti yang dijelaskan sebelumnya, dijalankan oleh Bidang Permukiman. Secara garis besar Bidang Permukiman memiliki tugas untuk merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan DISPERKIM dalam Bidang Permukiman. Dalam mencapai sasaran “Mengurangi persentase rumah tidak layak huni” dan “Mengurangi luas kawasan kumuh”, Bidang Permukiman mempunyai tugas yaitu menyelidiki dan mempelajari tata letak permukiman kumuh dan rawan bencana. Mengatur pengelolaan air limbah dan layanan air bersih untuk

permukiman. Serta menyusun dan menyiapkan bahan dan data evaluasi pengembangan permukiman kumuh dan daerah rawan bencana. Berdasarkan sasaran dan tugas tersebut, program pemberian bantuan sanitasi dan rumah tidak layak huni dibuat untuk masyarakat kota Balikpapan.

Program pemberian bantuan sanitasi dan rumah tidak layak huni dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 yang berisi tentang bantuan insentif perumahan swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tujuan bantuan insentif perumahan swadaya adalah agar MBR dapat secara mandiri membangun atau meningkatkan kualitas perumahan, Sehingga bisa hidup di rumah yang layak di lingkungan yang sehat dan aman (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2011).

Pemberian bantuan sanitasi dan rumah tidak layak huni sudah dilakukan beberapa tahun sejak DISPERKIM berdiri. Proses pemberian bantuan yang sedang berjalan dimulai dari DISPERKIM meminta data rekomendasi penerima bantuan kepada kelurahan yang ada di kota Balikpapan. Kemudian DISPERKIM meninjau langsung keadaan calon penerima bantuan untuk melakukan verifikasi persyaratan. Setelah verifikasi selesai dilakukan, rencana pemberian bantuan dimasukkan ke dalam anggaran yang ada untuk mendapatkan dana bantuan dari sumber dana yang telah ditentukan. Setelah dana bantuan dapat dicairkan, dana tersebut diberikan kepada toko material yang telah ditunjuk untuk melaksanakan proses pemberian bantuan. Setelah pekerjaan selesai dikerjakan oleh toko material maka proses pemberian bantuan telah selesai, selanjutnya DISPERKIM meminta laporan kemajuan dari penerima bantuan untuk memastikan bantuan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.

Berdasarkan proses pemberian yang telah dijelaskan, pada pelaksanaannya ditemui beberapa permasalahan, seperti lamanya waktu yang diperlukan sampai bantuan diberikan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan lambatnya data rekomendasi diberikan oleh pihak kelurahan, selain itu juga karena kurangnya sumber daya manusia yang menjalankan proses pemberian bantuan ini seperti mengelola data yang ada, membuat laporan terkait pemberian bantuan, dan mendata rincian proses penyaluran bantuan. Namun permasalahan utama pada proses pemberian bantuan adalah pengelolaan data yang masih belum baik. Pengelolaan

data masih dilakukan secara manual dengan bantuan komputer, sehingga data masih belum terorganisir dengan baik. Selain itu tingkat keamanan data masih kurang karena siapapun yang mengakses komputer dapat melihat data tersebut. Pemberitaan atau transparansi tentang pemberian bantuan juga belum tersampaikan dengan maksimal, karena hanya mengandalkan pemberitaan *website* resmi DISPERKIM. Menurut penelitian yang dilakukan (Hertati & Nurhadi, 2019) menyatakan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berhasil membantu pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyaluran dan penggunaan bantuan. SPBE juga dapat menyediakan pengelolaan pembukuan dan pembuatan laporan yang dibutuhkan. Berdasarkan penelitian tersebut dan permasalahan yang serupa dengan DISPERKIM, maka SPBE diperlukan untuk mengatasi permasalahan di DISPERKIM.

Penerapan SPBE diatur oleh Peraturan Walikota No.31 Tahun 2020. Penerapan SPBE menjadi arahan ke depan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan kota Balikpapan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya (Effendi R. , 2020). SPBE dibutuhkan untuk membantu Bidang Permukiman melaksanakan pengelolaan data, membuat laporan terkait pemberian bantuan, dan mendata rincian proses penyaluran bantuan. Sistem juga diharapkan dapat menunjukkan transparansi proses pemberian bantuan kepada penerima bantuan melalui pemberitahuan berkala proses yang sedang berlangsung. Selain itu juga diharapkan dengan sistem, pendataan calon penerima bantuan tidak lagi bergantung pada data rekomendasi dari kelurahan, melainkan masyarakat dan rukun tetangga dapat mengajukan permohonan bantuan melalui sistem. Menurut penelitian (Ziadi, Supriyono, & Wijaya, 2016) dengan penerapan SPBE, proses bisa lebih efisien dan mengurangi pihak yang terlibat serta dapat mempersingkat waktu pelaksanaan proses bisnis. Sehingga dengan adanya penerapan SPBE di DISPERKIM diharapkan dapat membuat proses bisa lebih efisien dan mempersingkat waktu proses bisnis.

Penelitian yang dilakukan (Yuhefizar, Sanjani, & Chadri, 2019) membuktikan bahwa SPBE dapat menjadi alternatif baru agar tata kelola pemerintah berjalan efektif, efisien, dan transparan. Berdasarkan penelitian tersebut

SPBE dapat menjadi solusi untuk permasalahan keefektifan, efisiensi, dan transparansi dalam proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh DISPERKIM. Menurut penelitian (Saputro, Widiarta, & Julkarnain, 2020) SPBE juga membantu mengurangi beban kerja dalam proses pendataan masyarakat calon penerima bantuan. Berdasarkan penelitian tersebut, penerapan SPBE lebih lanjut dapat mengurangi beban kerja Bidang Permukiman karena sebagian pekerjaan dikerjakan oleh sistem. Dari dua penelitian tersebut, disimpulkan dengan proses pendataan dan pemberian bantuan melalui SPBE membantu memangkas waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan data calon penerima bantuan dan memudahkan masyarakat untuk mendaftar sebagai calon penerima bantuan. Selain itu penerima bantuan juga dapat melihat langsung informasi proses pemberian bantuan melalui sistem, sehingga dapat memberikan transparansi yang jelas terkait proses pemberian bantuan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan maka penelitian ini akan mengangkat judul Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bantuan Sanitasi dan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan. Diharapkan penelitian ini dapat membantu pelaksanaan pemberian bantuan sanitasi dan rumah tidak layak huni agar lebih efektif, efisien, dan memiliki transparansi yang baik, sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik yang diberikan oleh DISPERKIM kepada masyarakat kota Balikpapan.

Pengembangan SPBE ini menggunakan metode *Personal Extreme Programming* (XP) yang terdapat tujuh fase yaitu *Requirements, Planning, Iteration Initialization, Design, Implementation, System Testing, dan Retrospective*. Penelitian ini telah menyelesaikan total 195 (seratus sembilan puluh lima) *story point* yang dikerjakan dalam 5 (lima) iterasi. Hasil pengujian tidak menemui ketidakpuasan atau kegagalan, sehingga diharapkan dapat membantu proses pemberian bantuan rumah tidak layak huni pada Bidang Permukiman DISPERKIM.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, Bidang Permukiman DISPERKIM belum memiliki SPBE tentang bantuan sanitasi dan rumah tidak layak huni. Sistem tersebut harus memiliki beberapa fitur yang dapat menunjang kegiatan pemberian bantuan, seperti yang telah dijelaskan di latar belakang. Dari permasalahan utama yang telah dijelaskan dijabarkan menjadi pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang SPBE bantuan sanitasi dan rumah tidak layak huni pada Bidang Permukiman DISPERKIM?
2. Bagaimana mengembangkan SPBE bantuan sanitasi dan rumah tidak layak huni pada Bidang Permukiman DISPERKIM?
3. Bagaimana pengujian SPBE pada Bidang Permukiman DISPERKIM yang telah dikembangkan?

1.3 Batasan Masalah

Agar permasalahan dapat lebih mudah dipahami dan diselesaikan, maka penulis memberikan batasan dalam penelitian sebagai berikut:

1. SPBE berbasis *website* dan dikembangkan menggunakan *framework* Laravel.
2. SPBE dikembangkan dengan metode *Personal Extreme Programming*.
3. Pengguna SPBE merupakan masyarakat kota Balikpapan.
4. Pengelola SPBE merupakan pegawai bidang permukiman DISPERKIM kota Balikpapan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Merancang SPBE bantuan sanitasi dan rumah tidak layak huni pada Bidang Permukiman DISPERKIM.
2. Mengembangkan SPBE bantuan sanitasi dan rumah tidak layak huni pada Bidang Permukiman DISPERKIM.
3. Melakukan pengujian SPBE pada Bidang Permukiman DISPERKIM yang telah dikembangkan.

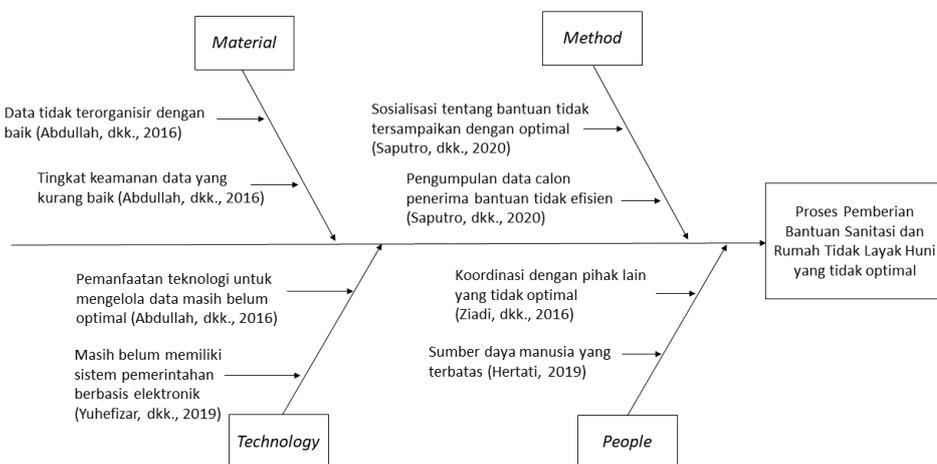
1.5 Manfaat Penelitian www.itk.ac.id

Manfaat yang didapatkan dari SPBE bantuan sanitasi dan rumah tidak layak huni pada Bidang Permukiman DISPERKIM ialah sebagai berikut:

1. Membantu DISPERKIM dalam membuat SPBE bantuan sanitasi dan rumah tidak layak huni.
2. Membantu meningkatkan efisiensi proses pemberian bantuan sanitasi dan rumah tidak layak huni.
3. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendaftar untuk bantuan sanitasi dan rumah tidak layak huni.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini dimodelkan menggunakan diagram *fishbone*. Melalui ilustrasi ini dijelaskan alur pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Gambar 1.1 terdapat inti permasalahan yaitu proses pemberian bantuan sanitasi dan rumah tidak layak huni yang tidak optimal. Inti permasalahan tersebut disebabkan oleh 4 (empat) kategori yaitu *method*, *technology*, *people*, dan *material*.

Pada kategori *method* berfokus terhadap proses dan metode. Permasalahannya yang dihadapi DISPERKIM yaitu sosialisasi tentang bantuan sanitasi dan rumah tidak layak huni tidak berjalan dengan optimal karena tidak ada pemberitahuan secara masif. Penyebab permasalahan berikutnya adalah pengumpulan data calon penerima bantuan yang tidak berjalan dengan efisien dan terkesan lambat karena berhubungan dengan pihak kelurahan. Permasalahan ini dialami juga pada penelitian yang dilakukan (Saputro, Widiarta, & Julkarnain, 2020), dimana sosialisasi pemberian bantuan tidak dilakukan secara merata dan pendataan calon penerima bantuan tidak efisien karena dilakukan secara manual. Solusi yang diberikan dari permasalahan pada penelitian tersebut adalah pengembangan SPBE yang dapat memberikan informasi pemberian bantuan secara merata dan membantu proses pendataan, hal ini sama seperti solusi yang ditawarkan pada penelitian ini yaitu pengembangan SPBE yang dapat memberikan sosialisasi yang merata dan pendataan yang lebih efisien.

Kategori *people* berfokus pada permasalahan terkait manusia. Salah satu permasalahan DISPERKIM adalah koordinasi dengan pihak lain yang tidak optimal karena lambatnya respon dari kelurahan untuk memberikan data terkait calon penerima bantuan. Permasalahan ini juga dihadapi pada penelitian yang dilakukan (Ziadi, Supriyono, & Wijaya, 2016) dimana respon pemerintah terhadap keluhan masyarakat lambat untuk ditanggapi. Solusi yang diberikan pada penelitian tersebut adalah membuat SPBE yang menangani keluhan masyarakat, hasilnya respon diberikan dengan sangat cepat langsung oleh lembaga yang berkaitan. Solusi yang ditawarkan pada penelitian ini juga serupa, yaitu pembuatan SPBE agar permohonan penerimaan bantuan dapat langsung sampai ke DISPERKIM tanpa melalui pihak lain. Permasalahan lainnya adalah sumber daya manusia yang terbatas, pada penelitian (Hertati & Nurhadi, 2019) juga terjadi hal yang serupa. Solusi yang ditawarkan adalah membuat SPBE untuk membantu pekerjaan yang ditangani sehingga lebih ringan karena sebagian dikerjakan oleh sistem, solusi serupa juga berlaku untuk penelitian ini, dengan adanya SPBE pekerjaan yang mudah dan bisa ditangani dengan cepat akan dilakukan oleh sistem

Pada kategori *technology* membahas permasalahan terkait teknologi yang digunakan. Permasalahannya pada DISPERKIM yaitu pemanfaatan teknologi

www.itk.ac.id

untuk mengelola data masih belum optimal karena teknologi yang digunakan terbatas pada aplikasi pengolahan kata seperti *Microsoft word* dan *Microsoft excel*. Permasalahan serupa juga dialami oleh (Abdullah D. &, 2016) yaitu proses pendataan yang masih dilaksanakan dengan teknologi yang terbatas. Solusi yang ditawarkan penelitian tersebut adalah dengan membuat sistem informasi pendataan sehingga proses lebih optimal dan mempercepat pengerjaan. Solusi pada penelitian ini juga memiliki prinsip yang serupa yaitu pengembangan SPBE untuk membuat proses pendataan calon penerima bantuan lebih efisien dan optimal. Permasalahan lainnya adalah masih belum memiliki sistem pemerintahan berbasis elektronik. Permasalahan serupa juga dialami oleh (Yuhefizar, Sanjani, & Chadri, 2019) dan solusi yang ditawarkan sama dengan penelitian ini yaitu pengembangan SPBE.

Pada kategori material, penyebab permasalahan yang terjadi adalah data yang tidak terorganisir dengan baik. Pengelolaan data masih menggunakan komputer dan diatur oleh manusia, sehingga masih sering terjadi *human error* dan kesalahan umum lainnya. Permasalahan lainnya yaitu tingkat keamanan data yang kurang baik. Dikarenakan data masih disimpan dengan komputer, data masih rawan untuk dicuri maupun dilihat oleh orang yang tidak memiliki kepentingan. Hal ini bisa berbahaya karena data yang dikelola sebagian merupakan data pribadi tentang calon penerima bantuan. Permasalahan serupa juga dialami oleh (Abdullah D. &, 2016) dimana proses pendataan belum optimal sehingga sering terjadi kesalahan dan keamanan data yang kurang baik. Solusi yang ditawarkan yaitu membuat sistem informasi, dimana solusi ini serupa dengan pengembangan SPBE yang ada di penelitian ini. Tujuan dari solusi ini adalah untuk memperbaiki pengelolaan data sehingga lebih baik, minim kesalahan, dan meningkatkan tingkat keamanan data menjadi lebih aman.